

# Sistem Kemitraan Usaha Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Perekonomian Kerakyatan

Oneng Setya Harini, Mochammad Rian Ahdian Morena

<sup>1</sup>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Republik Indonesia

<sup>2</sup>Politeknik Pariwisata Palembang

\*oneng.harini@gmail.com

## Informasi Artikel

Received: 15 Oktober 2024

Accepted: 07 November 2024

Published: 11 November 2024

## Keywords:

community business partnerships, empowerment of tourism SMES, tourism awareness groups, creative house of state-owned enterprises, sustainable economy

## Abstract

*This research aims to examine the role of community business partnerships in empowering Small and Medium Enterprises in the tourism sector, with a focus on the role of Community Business Partner Groups and Tourism Awareness Groups in opening market access and capital. The method used is case study analysis, including domestic cases in Surabaya. For example, Pokdarwis succeeded in marketing the ex-local Dolly hair oil product to penetrate the UK market. In addition, the collaboration between local arts and culture groups and the Ciputra group in tourism arts shows how cultural integration can increase tourist attractions. This research also includes an international study in Madagascar, where a local community partnership with the NGO Fanamby in the Anjozorobe-Angave Protected Area ecotourism has had a positive impact on conservation and economic well-being. The research results show that this partnership helps balance competition between SMEs, prevents exploitation, and facilitates SMEs to connect with large industrial supply chains. In conclusion, structured collaboration between Pokdarwis, KMUM, banking institutions and the BUMN Creative House is very important to support the sustainability of SMEs in the tourism sector. It is recommended that the government increase training and partnerships to expand economic opportunities and strengthen the regional economy.*

## Abstrak

**Kata Kunci:**  
kemitraan usaha masyarakat, pemberdayaan UKM pariwisata, kelompok sadar wisata, rumah kreatif BUMN, ekonomi berkelanjutan

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kemitraan usaha masyarakat dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di sektor pariwisata, dengan fokus pada peran Kelompok Mitra Usaha Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata dalam membuka akses pasar dan permodalan. Metode yang digunakan adalah analisis studi kasus, termasuk kasus domestik di Surabaya. Contohnya, Pokdarwis berhasil memasarkan produk minyak rambut eks-lokalisasi Dolly hingga menembus pasar Inggris. Selain itu, kolaborasi antara kelompok seni budaya lokal dan grup Ciputra dalam seni pariwisata menunjukkan bagaimana integrasi budaya dapat meningkatkan daya tarik wisata. Penelitian ini juga mencakup studi internasional di Madagaskar, di mana kemitraan masyarakat lokal dengan LSM Fanamby di ekowisata Kawasan Lindung Anjozorobe-Angave memberikan dampak positif pada konservasi dan kesejahteraan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan kemitraan ini membantu menyeimbangkan persaingan antar UKM, mencegah eksploitasi, serta memfasilitasi UKM untuk terhubung dengan rantai pasok industri besar. Kesimpulannya, kolaborasi terstruktur antara Pokdarwis, KMUM, lembaga perbankan, dan Rumah Kreatif BUMN sangat penting untuk mendukung keberlanjutan UKM di sektor pariwisata. Disarankan agar pemerintah meningkatkan pelatihan dan kemitraan guna memperluas peluang ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.

## **PENDAHULUAN**

Kepariwisata Indonesia telah menjadi sektor utama dalam Pembangunan Nasional yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional 2010–2025. Tujuan dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, tata kelola destinasi pariwisata menjadi komponen penting yang harus dijalankan secara konsisten oleh masyarakat dan pelaku usaha. Tata kelola ini juga sejalan dengan teori Penta Helix menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (2020), yang menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM) untuk mencapai tata kelola destinasi yang baik berbasis good governance. Sinergi ini memperkuat kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mengkaji implementasi kemitraan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagian besar studi fokus pada aspek ekonomi atau lingkungan tanpa mempertimbangkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian yang mengeksplorasi sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media dalam konteks tata kelola destinasi pariwisata masih sangat terbatas. Keterhubungan antara berbagai aktor ini penting untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, kurangnya penelitian yang meneliti dampak kemitraan usaha terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas lokal di destinasi pariwisata, terutama di daerah yang sedang

berkembang, juga menjadi perhatian. Meskipun teori Penta Helix telah diusulkan, aplikasinya dalam konteks pariwisata lokal belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menganalisis bagaimana kemitraan usaha yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dapat meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem kemitraan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia, mengkaji peran sinergi antara berbagai pemangku kepentingan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media dalam tata kelola destinasi yang berkelanjutan, meneliti dampak kemitraan usaha terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di destinasi pariwisata yang sedang berkembang, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan juga diatur dalam Peraturan Kementerian Pariwisata No. 14 Tahun 2016, yang menekankan empat pilar utama: pengelolaan yang berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Teori keberlanjutan pariwisata yang diperbarui oleh Butler (2022) melalui model Tourism Area Life Cycle (TALC) juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya untuk mempertahankan daya saing destinasi dalam jangka panjang. Selain itu, teori Ekologi Pariwisata oleh Bramwell & Lane (2021) menggarisbawahi pentingnya interaksi yang bijak antara manusia dan

lingkungan dalam pariwisata. Keberlanjutan dalam pariwisata tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan dan budaya.

Pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan juga melibatkan pemberdayaan komunitas lokal, seperti yang diuraikan dalam teori pemberdayaan oleh Friedmann (2021). Pemberdayaan ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya, pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dalam pengembangan destinasi. Pendekatan ini diiringi dengan konsep antisipasi dan perluasan, menurut Sharpley (2020). Antisipasi berfokus pada pengelolaan potensi dampak pariwisata, sementara perluasan mengarah pada dampak positif yang dirasakan oleh komunitas sekitar destinasi, termasuk pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Prinsip ini mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal.

Kemitraan usaha dalam pariwisata juga memainkan peran penting dalam tata kelola destinasi. Menurut Porter (2021) dalam konsep Value Chain, industri pariwisata melibatkan berbagai aktor yang saling terkait untuk menciptakan produk bernilai tinggi. Kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan internasional diarahkan pada pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan, yang menciptakan rantai nilai yang mendukung tujuan pembangunan destinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem kemitraan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, sejalan dengan teori kemitraan usaha menurut Gray (2022). Kolaborasi ini mendukung terbentuknya destinasi berdaya saing yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antar-pemangku kepentingan melalui pendekatan Penta Helix dan didukung oleh pemberdayaan komunitas serta kemitraan usaha. Pengelolaan destinasi yang berkelanjutan melibatkan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, kemitraan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat lokal terbukti efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai pengembangan kemitraan usaha dalam pariwisata sebagai strategi utama dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, social.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kepariwisata Indonesia saat ini telah menjadi salah satu sektor utama dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional 2010–2025, pembangunan kepariwisataan nasional bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP RI No. 50 Tahun 2011). Dalam konteks ini, tata kelola destinasi pariwisata menjadi elemen mendasar yang perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh masyarakat serta pelaku usaha di destinasi tersebut.

Teori Penta Helix yang dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2020) menjadi landasan penting dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata. Teori ini menekankan bahwa lima aktor kunci yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media harus

berkolaborasi untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan destinasi. Setiap unsur memiliki peran penting dalam memastikan terciptanya tata kelola destinasi yang berbasis pada prinsip good governance. Dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai elemen sentral dalam pengambilan keputusan, diharapkan sinergi tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sektor pariwisata.

Dalam konteks ini, model siklus hidup destinasi yang diperkenalkan oleh Butler (2022) dalam teori Tourism Area Life Cycle (TALC) memberikan kerangka pemahaman yang relevan. Model ini menjelaskan tahapan perkembangan suatu destinasi pariwisata, dari tahap eksplorasi hingga revitalisasi atau penurunan. Penting untuk memahami bahwa pengelolaan destinasi yang baik harus memperhatikan setiap fase dalam siklus hidupnya, termasuk perlunya pemeliharaan sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama. Dengan demikian, konsep keberlanjutan menjadi esensial, di mana setiap destinasi diharapkan dapat mengembangkan ekonominya tanpa merusak lingkungan dan tetap menghargai budaya lokal, sehingga dapat terus bersaing dalam jangka panjang.

Selanjutnya, teori Ekologi Pariwisata yang dikemukakan oleh Bramwell dan Lane (2021) menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara manusia dan lingkungan dalam konteks pariwisata. Teori ini menekankan bahwa pariwisata tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam hal ini, interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, dan lingkungan harus dikelola secara bijaksana agar dampak negatif

dapat diminimalisir. Dengan penekanan pada keberlanjutan, teori ini memperkuat pandangan bahwa aspek ekonomi harus sejalan dengan upaya konservasi lingkungan dan pelestarian budaya yang menjadi daya tarik utama dari destinasi pariwisata.

Pentingnya pemberdayaan komunitas dalam tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan semakin diperkuat oleh teori yang dikembangkan oleh Friedmann (2021). Pemberdayaan masyarakat lokal dianggap sebagai kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan destinasi. Komunitas lokal tidak hanya dilibatkan sebagai pelaku ekonomi tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, destinasi pariwisata dapat lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir pelaku usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat lokal secara keseluruhan.

Terakhir, konsep kemitraan usaha yang dijelaskan oleh Gray (2022) dan Porter (2021) dalam teori rantai nilai (Value Chain) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan internasional dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dalam rantai nilai pariwisata, setiap aktor, mulai dari penyedia jasa hingga pemerintah dan masyarakat lokal, memiliki peran penting dalam menciptakan produk pariwisata yang bernilai tinggi. Konsep ini juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dalam kemitraan usaha sangatlah penting, di mana kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan masyarakat lokal dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan. Dengan demikian, seluruh elemen ini saling terkait dalam menciptakan tata kelola destinasi pariwisata yang

berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode yang bersifat alamiah. Pendekatan kualitatif memungkinkan deskripsi yang lebih mendalam terhadap data dan analisis permasalahan yang diteliti guna membangun makna tertentu. Sementara itu, studi kasus dimaksudkan untuk memahami isu atau masalah yang spesifik guna memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan tersebut.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara mendalam peneliti dan informan, dengan di dukung oleh berbagai data lain sebagai pelengkap dan pendukung. Data pelengkap dan pendukung yang dimaksud mencakup hasil pengamatan langsung peneliti serta berbagai referensi pustaka yang relevan.

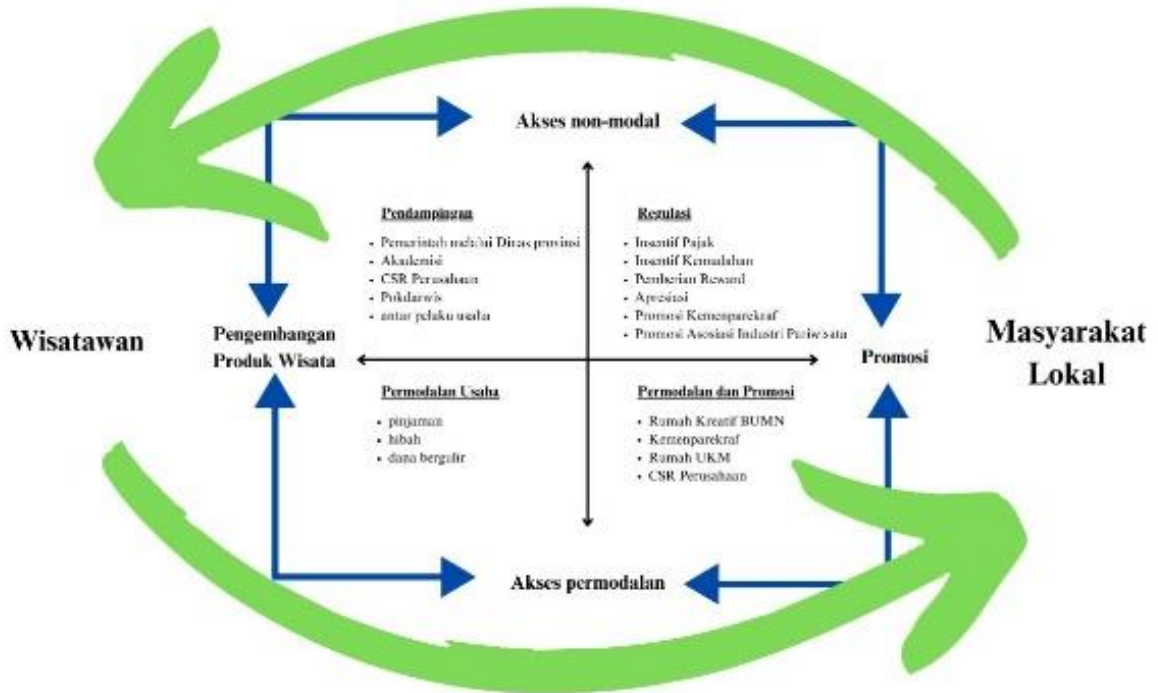
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yaitu kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar menjadi catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan uraian deskriptif untuk menyusun informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis untuk memperoleh pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan perumusan makna dari data yang telah diperoleh dan disajikan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Rencana Aksi Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Destinasi Pariwisata**

Indonesia memiliki aset kebudayaan dimana akar dari inovasi adalah budaya itu sendiri. Ketika budaya tersebut dikaitkan, dikombinasikan dan dikembangkan dengan olah pikir masyarakat maka hal tersebut menjadi inovasi. Inovasi perlu terus dipasarkan dan diuji coba agar dapat menemukan pasar yang tepat. Indonesia sudah memilii semuanya, dan yang diperlukan saat ini adalah bagaimana membuat sebuah kemitraan yang dapat menggabungkan berbagai potensi pelaku usaha untuk saling membantu, menguatkan dan mendukung inovasi satu sama lain untuk dapat meningkatkan kekuatan sebuah destinasi dan mampu bersaing secara global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah destinasi pariwisata merupakan aspek krusial dalam menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Proses ini dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya pariwisata secara efektif. Salah satu tahap penting dalam proses pemberdayaan ini adalah fokus pada tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah individu yang berada dalam usia produktif tetapi belum mampu untuk membuka usaha secara mandiri. Dalam konteks ini, kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan pengalaman di perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata menjadi langkah awal yang strategis. Adapun tahapan tersebut yaitu:



Sumber: Peneliti (2024)

### Tenaga Kerja

Tenaga kerja disini ditujukan untuk masyarakat yang masuk dalam usia produktif yang tidak mampu secara mandiri membuka usaha. Dalam klasifikasi ini, tenaga kerja diberikan kesempatan untuk bekerja dan mendapat pengalaman di sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang pariwisata dengan

terlebih dulu diberikan pelatihan dalam usaha jasa pariwisata. Kesempatan dan pengalaman kerja ini nantinya akan meningkatkan kemampuan masing-masing individu, dan sebagai bekal ketampilan dalam memulai usaha. Adapun bentuk aksinya dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Bentuk aksi pemberdayaan masyarakat tahap satu

Sumber: Peneliti (2024)

Pada Gambar 2 menggambarkan aktivitas pemberdayaan masyarakat pada tahap pertama, yaitu fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berada dalam usia produktif. Dalam

gambar tersebut, terdapat beberapa elemen kunci dari proses ini. Pertama, di sisi kiri terlihat individu yang sedang mengikuti sesi pelatihan, yang dirancang khusus untuk membekali peserta dengan

keterampilan praktis dalam usaha jasa pariwisata, seperti manajemen hotel, pelayanan tamu, dan keterampilan pemasaran.

Pelatihan ini penting untuk mempersiapkan mereka agar lebih kompetitif di pasar kerja. Di bagian tengah gambar, individu yang bekerja di perusahaan pariwisata, seperti hotel, restoran, atau agen perjalanan, menggambarkan pengalaman kerja yang diperoleh di lingkungan profesional. Pengalaman ini memungkinkan mereka menerapkan keterampilan yang telah dipelajari selama pelatihan dan mendapatkan wawasan langsung tentang operasional bisnis di sektor pariwisata.

Sementara itu, di sisi kanan gambar, individu menunjukkan semangat dan kepercayaan diri setelah mendapatkan pelatihan dan pengalaman kerja, mencerminkan peningkatan kapasitas individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk memulai usaha secara mandiri di masa depan.

Gambar ini juga mencerminkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri pariwisata, yang berkolaborasi untuk menyediakan pelatihan dan peluang kerja

bagi masyarakat. Sinergi antara stakeholder sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan tenaga kerja. Dengan demikian, gambar ini membantu pembaca memahami bentuk-bentuk aksi konkret dalam proses pemberdayaan tenaga kerja di daerah destinasi pariwisata serta pentingnya pelatihan dan pengalaman kerja untuk mempersiapkan individu agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam sektor pariwisata.

### Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Pemerintah berperan penting dalam mengidentifikasi dan membuat daftar pelaku usaha yang terlibat dalam 12 jenis usaha dan produk barang serta jasa yang terkait dengan pariwisata, sekaligus memfasilitasi mereka dalam rantai pasokan (*supply chain*) industri pariwisata di daerah destinasi. Salah satu contoh kemitraan dalam rantai pasok adalah kolaborasi antara pihak swasta dengan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan petani lokal. Diskusi yang dilakukan memungkinkan kedua kelompok ini untuk saling memahami kebutuhan dan kapasitas masing-masing, sehingga menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.



Gambar 3. Bentuk aksi pemberdayaan masyarakat tahap dua  
Sumber: Peneliti (2024)

Selain itu, kemitraan juga terjalin dengan kelompok sadar wisata

(pokdarwis) dan masyarakat daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup,

terutama terkait pengolahan sampah di daerah destinasi. Sampah-sampah tersebut dapat diolah menjadi produk daur ulang atau melalui proses pencacahan dan peleburan untuk keperluan industri lainnya. Kerja sama ini tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

### **Inisiatif Bisnis**

Pembentukan dan pengembangan usaha baru di sektor pariwisata berfokus pada 12 jenis usaha yang terkait erat dengan industri ini. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholder) untuk menciptakan iklim wirausaha yang sehat dan kondusif bagi perkembangan perusahaan baru. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah secara aktif memantau, membina, serta mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM), baik yang sudah lama beroperasi maupun yang baru dibentuk. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi UKM dalam rantai nilai pariwisata, sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi dari sektor pariwisata di daerah destinasi.



Gambar 4. Bentuk aksi pemberdayaan masyarakat tahap tiga  
Sumber: Peneliti (2024)

### **Instrumen Pendampingan dan Promosi Berbasis Kemitraan Usaha**

Pembangunan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata tidak terlepas dari peran lembaga pembiayaan, seperti bank dan BUMN, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah. Kredit ini terutama ditujukan untuk industri jasa di sektor pariwisata, dengan keunggulan berupa bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan kredit usaha makro.

Meski demikian, pelaku usaha perlu memahami bahwa kredit usaha mikro tetap memerlukan jaminan. Untuk kredit di bawah Rp.25.000.000,00, jaminan bisa berupa BPKB kendaraan, sementara jumlah yang lebih besar akan memerlukan jaminan yang lebih signifikan dan perhitungan yang lebih detail. Risiko yang menyertai pengajuan kredit ini terkadang menyurutkan niat pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka lebih jauh. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendampingan yang mampu membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan produk, menjual, dan memasarkan hasil usaha mereka.



Pembentukan Kelompok Mitra Usaha Pariwisata (KMUP) di dalam struktur Pokdarwis merupakan langkah penting untuk mendukung para pelaku usaha di bidang pariwisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah mapan dapat membentuk Kelompok Mitra Usaha Masyarakat (KMUM) yang bertugas melakukan sosialisasi kemitraan usaha, mengkoordinir penyaluran produk barang dan jasa, serta mendukung kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah bagi destinasi wisata. KMUP memfasilitasi pelaku usaha dalam mencari dan menghubungkan UKM dengan mitra dari industri makro yang membutuhkan produk dan jasa pariwisata. Selain itu, KMUM juga membantu menciptakan pengalaman tambahan bagi pengunjung melalui produk pariwisata yang melibatkan masyarakat, seperti pertunjukan seni, rental peralatan wisata, pemandu lokal, kuliner, dan suvenir.

Kelompok Mitra Usaha Masyarakat (KMUM) juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelaku UKM dan mencari solusi terbaik untuk memenuhinya. Mereka memaksimalkan pemasaran dan peluang penjualan produk UKM melalui bisnis pariwisata, dengan cara menyediakan katalog produk yang mencakup suvenir, pakaian, dan barang-barang setengah jadi yang dapat dipasok ke perusahaan

besar. KMUM memfasilitasi hubungan pelaku usaha dengan Rumah Kreatif BUMN, yang menawarkan ruang pameran, jalur pemasaran, dan penyaluran program CSR untuk pelaku usaha unggulan. Selain itu, KMUM berperan dalam mendampingi masyarakat dalam manajemen usaha serta membantu pelaku usaha mengakses kredit dari lembaga perbankan maupun non-perbankan.

Pembentukan KMUM juga mencegah persaingan tidak sehat antar pelaku usaha mikro, serta menjadi penyeimbang dan fasilitator agar usaha mikro dapat masuk dalam rantai pasokan perusahaan besar, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mengarahkan Pokdarwis agar memiliki satuan unit khusus yang membantu para pelaku UKM menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. KMUM juga berfungsi sebagai wadah konsultasi untuk menangani berbagai permasalahan terkait kemitraan usaha, serta mencegah terjadinya eksploitasi dari perusahaan besar atau wisatawan. Dengan demikian, pembentukan KMUM menjadi semakin penting sebagai upaya mendukung keberlanjutan usaha pariwisata di daerah destinasi.

Tabel 1. Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Domestik dan Internasional

Studi Kasus Domestik	Studi Kasus Internasional
<p>Kelompok Sadar Wisata yang ada di Surabaya khususnya destinasi yang merupakan ex lokalisasi Dolly, membantu mempromosikan produk minyak rambut kepada para exportir. Produk minyak rambut itupun laku keras dipasaran hingga menembus pasar Inggris.</p>	<p>Madagaskar memiliki sebuah organisasi gabungan masyarakat dan pengelola Ekowisata di Kawasan Lindung Anjozorobe- Angave, Madagaskar. Proyek ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi kemiskinan. Sebuah LSM lokal, Fanamby, telah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan berbagai produk wisata untuk menciptakan <i>eco-homestay</i> (10 bungalow) di pintu masuk cagar alam</p>
<p>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemitraan Usaha sedang berlangsung di Surabaya, setelah selesai melakukan FGD,</p>	

Studi Kasus Domestik	Studi Kasus Internasional
perwakilan perusahaan developer kawasan grup Ciputra melakukan pendekatan kepada kelompok sanggar seni budaya untuk mengisi kegiatan seni mereka yaitu pertunjukkan musik Jazz yang akan digabungkan dengan gamelan Jawa Timur.	serta melakukan pemasaran melalui berbagai <i>platform</i> . Proyek ini mendulang sukses yang baik dan masyarakat di kawasan lindung tersebut mendapat peningkatan kesejahteraan yang berarti dari pariwisata.

Sumber: Peneliti (2024)

Tabel 1 memberikan gambaran mengenai “Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata: Domestik vs Internasional” tentang bagaimana kemitraan usaha dapat berperan signifikan dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata. Pada studi kasus domestik, contoh dari Surabaya menunjukkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam memfasilitasi pemasaran produk lokal, seperti minyak rambut dari eks-lokalisasi Dolly, hingga berhasil memasuki pasar internasional, seperti Inggris. Ini menunjukkan bahwa peran Pokdarwis tidak hanya terbatas pada pengelolaan destinasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan antara usaha mikro lokal dan pasar global. Kemudian, studi kasus lain di Surabaya menggambarkan kolaborasi antara kelompok seni budaya lokal dan pengembang properti besar, seperti grup Ciputra, yang melibatkan pertunjukan seni dalam kegiatan pariwisata, memperlihatkan integrasi budaya lokal dengan kegiatan pariwisata komersial.

Sementara itu, pada studi kasus internasional, proyek ekowisata di Madagaskar menunjukkan bagaimana kolaborasi antara LSM lokal, Fanamby, dan masyarakat sekitar Kawasan Lindung Anjozorobe-Angave berhasil mengembangkan produk pariwisata berbasis lingkungan seperti eco-homestay. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, pariwisata dapat berkontribusi pada konservasi lingkungan sekaligus mengurangi kemiskinan di

wilayah tersebut. Tabel diatas menggarisbawahi pentingnya kemitraan antara masyarakat lokal, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, serta menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara signifikan.

Pokdarwis dan kelompok pelaku usaha masyarakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga perbankan. Dalam hal ini, konsep pendampingan kemitraan usaha masyarakat dengan lembaga perbankan yang diatur oleh Restra Bank Indonesia terdiri dari beberapa model hubungan. Model hubungan pertama menggambarkan hubungan langsung antara bank dan Kelompok Sadar Masyarakat (KSM).

Pada model hubungan kedua, terdapat peran tambahan dari pihak ketiga yang membantu memfasilitasi hubungan antara bank dan KSM. Selanjutnya, model hubungan ketiga melibatkan interaksi yang lebih kompleks, di mana terdapat pihak penghubung yang aktif memfasilitasi baik di sisi perbankan maupun KSM. Sementara itu, model hubungan keempat menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur, di mana Kelompok Pengelola Masyarakat (KPM) berperan sebagai perantara utama dalam menjembatani hubungan dengan bank, memfasilitasi komunikasi, dan akses ke permodalan.

Rumah Kreatif BUMN dibentuk oleh Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara untuk melakukan

pembinaan terhadap para pelaku UKM, dengan tujuan menjadikan UKM di Indonesia lebih berkualitas. Rumah Kreatif BUMN (RKB) memiliki tiga tujuan utama, yaitu peningkatan kompetensi UKM, peningkatan akses pemasaran UKM, serta kemudahan akses permodalan bagi UKM. Pokdarwis disarankan untuk bermitra dengan Rumah Kreatif BUMN yang ada di daerahnya untuk membantu menyalurkan dan mengembangkan potensi UKM setempat. RKB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dari bank-bank BUMN, seperti program Wirausaha Muda dari Bank Mandiri, Kampong BNI Nusantara dari Bank BNI, Teras BRI dari Bank BRI, serta Kampung UKM digital dari Telkom Indonesia.

Sebagai wadah *Corporate Social Responsibility* (CSR) seluruh BUMN di Indonesia, Rumah Kreatif BUMN bertujuan untuk menumbuhkembangkan UKM potensial dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, serta bimbingan teknis kemitraan usaha. Setiap RKB dikelola oleh BUMN yang berada di lokasi industri terdekat, memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya Pokdarwis dan pelaku usaha, untuk mendapatkan pengetahuan serta dukungan dari berbagai narasumber yang terlibat dalam program-program tersebut.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian ini, telah dianalisis berbagai aspek mengenai peran kemitraan usaha masyarakat dalam pengembangan potensi UKM, khususnya di sektor pariwisata. Melalui berbagai model kemitraan, baik dengan lembaga perbankan maupun dengan Rumah Kreatif BUMN, diharapkan pelaku UKM dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mereka. Kemitraan ini terbukti penting dalam menciptakan sinergi antara pelaku usaha

mikro dengan industri yang lebih besar, serta dalam meningkatkan akses terhadap permodalan dan pelatihan yang bermanfaat bagi pengembangan usaha.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Pokdarwis, pelaku UKM, dan lembaga perbankan atau Rumah Kreatif BUMN sangat mendukung pengembangan usaha di daerah. Model kemitraan yang baik dapat membantu pelaku UKM dalam mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah, serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan program pendampingan yang disediakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memfasilitasi dan mendorong kemitraan ini agar dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait lebih proaktif dalam menjalin kemitraan dengan lembaga perbankan dan Rumah Kreatif BUMN. Hal ini penting untuk memastikan pelaku UKM mendapatkan dukungan yang memadai dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pelaku UKM juga perlu diberi pelatihan yang relevan agar mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada di pasar. Dengan demikian, diharapkan kemitraan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata: Studi kasus desa wisata Pujon Kidul, Malang. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 6(2), 55-66.
- Anggoro, R. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata: Analisis SWOT pada

- desa Tanjung Lesung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 3(1), 22-35.
- Asmoro, B. T., Setiyawan, A., & Abidin, Z. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata: Studi kasus desa wisata Pujon Kidul, Malang. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 6(2), 55-66.
- Anggoro, R. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata: Analisis SWOT pada desa Tanjung Lesung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 3(1), 22-35.
- Asmoro, B. T., Setiyawan, A., & Wahyudi. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata ramah lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan (Studi kasus Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Pagelaran). *Kata Rahardja*, 4(1), 13-22.
- Baker, J. S., & Dufresne, P. (2017). Community-based tourism: A development perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(1), 56-76.
- Bramasari, A., & Putri, R. M. (2020). Kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 6(1), 42-58.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2021). *Tourism and the environment: New approaches to sustainable tourism*. Routledge.
- Butler, R. W. (2022). *The tourism area life cycle: Conceptual and theoretical issues*. Channel View Publications.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2020). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship* (3rd ed.). Routledge.
- Friedmann, J. (2021). Empowering communities in sustainable tourism governance. Routledge.
- Gray, B. (2022). *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. Jossey-Bass.
- Laksono, N. F., Chawa, A. F., & Yuliati, Y. (2020). Pengelolaan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat (Studi kasus Desa Sawentar). *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(4), 865-878.
- Munir, U. (2022). Konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan (Studi kasus pariwisata di Pulau Lombok). *Yustisi Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 125-134.
- Novie, I., & Hidayah. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *UNY e-journal*. <https://eprints.uny.ac.id/53641/>
- Porter, M. E. (2021). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Prihatin, T., & Hidayat, A. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata: Studi kasus di Desa Selopamiro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 19-29.
- Rahim, F. (2012). *Buku pedoman kelompok sadar wisata*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sharpley, R. (2020). *Tourism, tourists and society*. Routledge.
- Sudrajat, R. (2020). Pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 77-85.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategi pembangunan kesejahteraan sosial*

*dan pekerjaan sosial.* Bandung: PT Refika Aditama.

- Syuldairi, R., & Febrina, R. (2021). Kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. *Journal of Governance Innovation, 1*(1), 130-153.
- Ulfah, N., & Rahmawati, A. (2021). Model kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 1*(2), 113-123.